

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dien, Tinangon dan Walandouw. 2015. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung". *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Djayasinga, Marselina. 2014. *Riset Anggaran untuk Rakyat Studi Kasus: APBD Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume XII No.1.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Ika Maya Sari, Mulyati Akib dan Anggini Shesilia (2018). Analisis Anggaran Belanja Daerah sebagai Alat Pengendalian pada Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*,3(1). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/9761-Article Text-3775-10745-1-PB.pdf
- Indra Chirstian Lontaan dan Sonny Pangerapan (2016). Analisis Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal Emba*, 4 (1) .Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/9761-Article Text2960-ID-analisis-belanja-anggaran-2012-2.pdf
- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nugraeni, N., & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Ramli Faud (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ropa, Oktavia M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.2: 738-747.
- Setiyanto, A., 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi.

LAMPIRAN